Psikosospen : Jurnal Psikososial dan Pendidikan
https://publisherqu.com/index.php/psikosospen/
Vol. 2 No. 3 September 2026
https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250326030437435

PROBLEMATIKA KELEMBAGAAN PENDIDIKAN ISLAM

Aslam[1], Alwan Suban[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
aslamtoliss@gmail.com [1] Alwan.suban@uin-alauddinac.id. [2]

Abstract

Setiap lembaga Pendidikan islam tidak akan lepas dari problematika dan hal itu. Berdasarkan sumbernya faktor yang mempengaruhi timbulnya problematika dalam lembaga Pendidikan berasal dari faktor internal meliputi gaya kepemimpinan, kurikulum pembelajaran, sumber daya manusia dalam hal ini staf dan guru, biaya dan lain lain sedangan faktor eksternal itu di pengaruhi oleh lingkungan Masyarakat serta pemerintah. Maka dari itu penelitian ini ingin mengkaji dan mengetahui lebih jauh apa saja problematika yang ditemui oleh lembaga Pendidikan islam, sebeb terjadinya serta apa saja Upaya -upaya yang dapat dilakukan oleh lembaga Pendidikan islam dalam mengatasi problematika tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis kritis riset-riset teoretis dan pragmatis seputar dinamika serta kelembagaan Pendidikan Agama Islam. Sumber data primer dalam studi ini meliputi dokumen kebijakan kelembagaan resmi, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, serta regulasi Kemendikbudristek terkait tata kelola dan status institusi pendidikan Islam. Hasil dari penelitian ini dikatahui bahwa problematika yang sering dihadapi oleh lembaga Pendidikan meliputi aspek kepemimpinan,kurikulum dan dikotomi ilmu, manajemen sumber daya manusia yang buruk, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, dan biaya lembaga Pendidikan yang rendah. Berdasarkan problematika ini maka uapaya yang dapat dilakukan meliputi rapikan manjemen tata kelolah perenacanaan dan pembagain tugas sesuai komptensi, melakukan rekrutmen staf tenaga pendidik sesuai kualifikasi dan ruitin melakukan pelatihan, kemudian melakukan pengembangan wakaf yang produktif, serta melakukan pengintegrasian antara Pendidikan umum dan Pendidikan agama. Impliksi dari penelitian adalah bagi pengelola lembaga, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembenahan perlu dimulai dari hal mendasar, seperti penyusunan visi dan tujuan tertulis, struktur organisasi dan uraian tugas, pencatatan administrasi dan aset yang tertib, serta pelatihan guru yang berbasis kebutuhan. Bagi pemerintah, kebijakan akreditasi dan penjaminan mutu perlu diiringi dukungan pelatihan, pendanaan, dan infrastruktur, terutama bagi lembaga di pedesaan dan pinggiran yang kesiapan digitalnya tertinggal.

Kata kunci : Problematika, Kelembagaan, dan Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN

Istilah problematika berasal dari kata Inggris *problematic*, yang berarti persoalan atau masalah. dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata ini dimaknai sebagai hal yang masih menimbulkan masalah dan belum dapat dipecahkan. Dalam kajian pustaka yang sama, *masalah* menurut KBBI berarti "sesuatu yang harus diselesaikan". Dari dua definisi itu disimpulkan bahwa problematika adalah sesuatu yang membutuhkan penyelesaian

Sementara lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan Islam. Ia memiliki struktur yang jelas dan bertanggung jawab atas jalannya proses pendidikan tersebut.[1] Bentuknya begitu beragam mulai dari madrasah, pesantren, madrasah diniyah, sekolah Islam terpadu, hingga perguruan tinggi keagamaan Islam. Berdasarkan hal ini problematika kelembagaan Pendidikan islam bisa dibagi menjadi dimensi yakni factor internal yaitu faktor- faktor yang berasal dari internal lembaga itu sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari luar lembaga tersebut.

Adapun akar lain yang menimbulkan problem secara umum sudah banyak terjadi di lembaga Pendidikan islam sering disebut dualisme. Yang dimaksud dualism dalam lembaga Pendidikan islam Adalah madrasah mengajarkan kurikulum nasional sekaligus menambah muatan keagamaan yang lebih intensif dibandingakan sekolah pada umumnya. Namun keduanya memiliki standar dan sistem manajemen yang berbeda, sehingga kebijakan dan standar saling tumpang tindih.

Rugulasi serta tata kelolah yang kurang baik juga memberikan problem besar dalam suatu lembaga Pendidikan islam. Kita ketahui bahwa antara Pendidikan formal dan pesanteren juga memilki Sejarah yang begitu Panjang, dahulunya madrasah diniyah pesantren pernah terpinggirkan dari system Pendidikan nasional sehingga penggabungan antara kedua kurikulum yakni kurukulm diniyah dan nasional dijadikan sebagai jalan penyambung antara keduanya setelah itu lahirnya UU Pesantren (UU No. 18 Tahun 2019.[2]

Menejerial internal yang kurang baik juga turut menambah permasalahan dalam lemabaga Pendidikan Islam. Problematika kelembagaan merupakan keniscayaan bagi semua lembaga pendidikan. Persoalannya begitu beragam mulai dari gaya kepemimpinan dan fungsi

---

[1] Istikomah, Rabiatul Adawiyah, dan Saiful Bahri, "Upaya Konstruktif terhadap Problematika Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia" *Tadbir Muwahhid Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,* 8.01. (2024)h 103.

[2] Ali Nasith, Abdul Bashith, dan Asnawan, "Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Pendidikan Formal terhadap Santri pada Era Regulasi Pendidikan Nasional" *International Journal of Community Service Learning* 7, 2, (2023) h 218

kepemimpinan, kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta sarana yang mungkin tidak mendukung dan prasarana yang tidak memedai.[3] Persoalan ini diperkuat oleh pemetaan internal yang tidak baik seperti visi-misi yang lemah, kurikulum yang overload, dan SDM pendidik yang kurang kompeten. Di tingkat pembelajaran, kajian tentang guru madrasah aliyah juga menemukan keterbatasan pemahaman konsep integrasi, media dan sumber belajar, serta pelatihan yang kurang relevan.

Faktor eksternal juga turut memperburuk problematika yang di alami oleh lembaga Pendidikan islam seperi turunya minta Masyarakat terhadap lembaga non formal seperti madarsah diniyah hal itu dipengaruhi oleh kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan sosial sebagian masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah umum karena menganggap masa depan lulusannya lebih terjamin.Anggapan seperti ini hanya dapat dijawab apabila lembaga pendidikan Islam melakukan pembenahan tata kelola. Berdasarkan uraian tersebut, makalah ini mengkaji problematika kelembagaan pendidikan Islam beserta upaya penguatannya.[4] Pesantren pun menghadapi keterbatasan sumber daya, persoalan regulasi, persaingan antar-lembaga pendidikan, dan stigma negatif yang tumbuh dikalangan Masyarakat umum. Oleh karena itu pentingnya kita mengetahui apa saja problematika yang terjadi dalam lembaga Pendidikan islam serta Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis kritis riset-riset teoretis dan pragmatis seputar dinamika serta kelembagaan Pendidikan Agama Islam. Sumber data primer dalam studi ini meliputi dokumen kebijakan kelembagaan resmi, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, serta regulasi Kemendikbudristek terkait tata kelola dan status institusi pendidikan Islam (madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam), serta literatur fundamental mengenai tata kelola dan epistemologi kelembagaan dari para pakar pendidikan Islam. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap artikel jurnal ilmiah terindeks, buku-buku relevan, serta prosiding konferensi akademis yang membahas

[3] Jaedi, Kurnaengsih, dan Sarwo Edi, "Problematika Kelembagaan Pendidikan Agama Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 4 (2023)h 2647.

[4] Medi Yulison Arza, "Problematika Pembelajaran PAI di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA" *Istinarah*, Riset *Keagamaan, Sosial dan Budaya,* 8 .1, (2026) h 20.

problematika dikotomi, kejelasan regulasi, tata kelola SDM, serta dualisme sistem kelembagaan pendidikan dalam rentang waktu dua dekade terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terstruktur (*content documentation*). Setelah data terkumpul, proses validasi dan kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber teori (*theoretical triangulation*), yakni dengan mempertemukan kerangka konseptual manajemen pendidikan modern dan sistem kelembagaan Islam untuk mencegah bias interpretasi. Peneliti melakukan pemilahan data (*data reduction*) guna menyaring informasi yang relevan dengan fokus problematika kelembagaan pendidikan Islam di tingkat struktural maupun operasional.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi kritis (*critical content analysis*) yang dikombinasikan dengan pendekatan hermeneutika kebijakan. Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan implikasi yuridis-filosofis dari struktur kelembagaan yang ada serta menemukan sintesis konseptual guna mengatasi hambatan institusional dan meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN

A. Konsep dan Ragam Kelembagaan Pendidikan Islam

1. Pengertian Kelembagaan Pendidikan Islam

   Lembaga pendidikan dapat dipahami sebagai organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mentransfer ilmu pengetahuan dan budaya kepada individu agar perilakunya menjadi lebih dewasa dan kehidupannya di masa depan menjadi lebih baik. Adapun kelembagaan merujuk pada wadah berdirinya organisasi tersebut, baik dalam bidang pendidikan formal maupun nonformal. Karena itu, kelembagaan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peran kepemimpinan sebagai penggerak untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang bermutu. Dalam sistem pendidikan nasional, Mahyerni membedakanya dalam tiga wujud pendidikan Islam, yakni sebagai lembaga, sebagai mata pelajaran, dan sebagai nilai. Pembedaan ini bersandar pada Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa pendidikan Islam dapat diselenggarakan pada jalur formal,

nonformal, dan informal.[5] Dengan demikian, kelembagaan pendidikan Islam dalam penelitian ini dimaknai sebagai wadah organisasi untuk penyelenggara pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah, hingga sekolah Islam terpadu, beserta tata kelola yang menyertainya, yaitu meliputi kepemimpinan, kurikulum madrasah, tenaga dan staf pendidik, sarana prasarana, dan pembiayaan.

2. Pesantren

Pesantren bukanlah hal baru di Indonesia. Lembaga pendidikan Islam ini sudah berdiri bahkan jauh sebelum negara Indonesia merdeka. Menurut Mahyerni, ada tiga peran utama yang harus terus dijalankan oleh pesantren: menjadi tempat belajar dan menanamkan nilai-nilai agama (*tafaqquh fi al-din*), menjadi pengontrol dinamika sosial di masyarakat, serta mendorong perubahan dan pemberdayaan warga. Dari bentuknya, pesantren terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, pesantren salaf (tradisional) yang tetap fokus mengkaji kitab kuning lewat sistem *sorogan* dan *bandongan*. Kedua, pesantren modern (*khalaf*) yang sudah menggabungkan pembelajaran agama dengan sistem sekolah. Ketiga, pesantren komprehensif yang memadukan keunggulan dari kedua sistem tersebut.

Agar tetap relevan, pesantren membuka diri dengan mengadopsi sistem sekolah. Pengembangan kurikulumnya dapat memakai strategi yang tidak merusak ciri khas pesantren dan tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Di sisi lain, Mahyerni mencatat bahwa banyak pesantren belum memiliki tujuan dalam bentuk tertulis sehingga tujuan itu hanya ada dalam angan-angan. Catatan ini menunjukkan bahwa kekuatan tradisi pesantren belum selalu diikuti perencanaan kelembagaan yang tertib.[6]

3. Madrasah

Madrasah merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam yang relatif lebih muda ketimbang pesantren. Kehadirannya baru dimulai pada awal abad ke-20, yang dipelopori oleh tokoh seperti Abdullah Ahmad di Sumatra Barat pada tahun 1909. Dalam perkembangannya, madrasah kini diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Pengakuan ini semakin kokoh sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB)

[5] Mahyerni, "Analisis Kebijakan Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam: Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia: Studi Komparatif", *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education*, 3.2 (2023) h 39.

[6] Ibid h 41-43

Tiga Menteri pada tahun 1975, yang bertujuan meningkatkan kualitas mutu madrasah agar lulusannya memiliki kesetaraan dengan sekolah umum di semua jenjang pendidikan. Dari segi kurikulum, jenjang di madrasah sejajar dengan sekolah umum, yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara SMA. Amir dan Suja'i, dengan mengutip Azra, menggambarkan madrasah sebagai sekolah umum plus. Selain mengikuti kurikulum umum, madrasah memiliki mata pelajaran agama dari Kementerian Agama, seperti Al-Qur'an Hadis, fikih, akidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab.[7] Posisi ganda ini menjadi kekuatan sekaligus sumber tuntutan, sebab madrasah dinilai dengan ukuran sekolah umum, tetapi juga diharapkan menjaga kekhasan keislamannya.

4. Sekolah Islam Terpadu

Sekolah Islam Terpadu (SIT) adalah bentuk sekolah berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang menyatukan pelajaran umum dan agama dalam satu kurikulum tanpa pemisahan. SIT menjadi pilihan favorit bagi keluarga Muslim karena beberapa alasan utama yakni Menerapkan prinsip Islam di seluruh sistem sekolah, kemudian Metode Pembelajaranya yang Memadukan berbagai pendekatan mengajar secara komprehensif serta bersinergi pada Tiga Lingkungan: Melibatkan kerja sama erat antara sekolah, rumah, dan masyarakat.

B. Problematika Kelembagaan Pendidikan Islam

Problematika kelembagaan pendidikan Islam dapat dipetakan ke dalam tujuh kelompok yang saling berkaitan, yaitu kepemimpinan dan manajemen, kurikulum dan dikotomi keilmuan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan aset, pembiayaan, regulasi dan birokrasi, serta tata kelola digital

1. Kepemimpinan dan Manajemen Lembaga

Kepemimpinan dan manajemen masih menjadi kendala utama dalam pendidikan Islam. Gaya kepemimpinan yang otoriter dan melenceng dari prinsip manajemen sering kali mematikan kreativitas pengajar, mengabaikan mutu pembelajaran, hingga memicu gulung tikarnya lembaga. Di tingkat madrasah, masalah

[7] Amir, Faradhillah, dan Ahmad Suja'i, 'Analisis Problematika dan Tantangan Madrasah Menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul di Masa Neo Modern', *Tarbawi*, 6.2 (2023) h 181.

ini terlihat dari ketidakjelasan visi-misi**,** ketidakseimbangan antara ilmu agama dan iptek, serta minimnya kaderisasi generasi Muslim yang mumpuni. Pada akhirnya, masalah pokok pendidikan Islam memang bermuara pada lemahnya tata kelola manajerial, rendahnya kualitas SDM, dan minimnya dukungan masyarakat.[8]

2. Kurikulum dan Dikotomi Keilmuan

Kurikulum adalah fondasi utama pendidikan yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Namun, sering kali pergantian kurikulum tidak otomatis mendongkrak mutu. Kunci utamanya tetap ada pada profesionalisme guru dan sistem evaluasi yang pas—sebab selama ini, evaluasi madrasah terlalu mengekor sekolah umum sehingga aspek moral dan nilai keagamaan justru terabaikan. Masalah kurikulum ini diperparah oleh dikotomi (pemisahan) antara ilmu agama dan ilmu umum. Warisan sistem pendidikan dualistis sejak zaman kolonial membuat pendidikan Islam sempat tertinggal dan memicu kesenjangan.[9] Kehadiran madrasah dan Sekolah Islam Terpadu (SIT) sebenarnya menjadi jalan keluar untuk menyatukan kedua jenis ilmu tersebut, meski tingkat kehasilannya sangat tergantung pada cara masing-masing sekolah mengelolanya.

3. Sumber Daya Manusia

Kualitas guru dan kepala madrasah memegang kunci utama dalam mendongkrak mutu pendidikan, namun sektor ini masih menghadapi banyak ganjalan. Karena mayoritas madrasah berstatus swasta, banyak guru yang mengabdi sebagai guru yayasan (bahkan paruh waktu) dengan gaji yang jauh dari layak. Masalah makin pelik karena banyak guru direkrut asal-asalan demi mencukupi kebutuhan sekolah tanpa melihat latar belakang pendidikannya, sementara di pesantren salaf, para ustaz yang jago kitab kuning sering kali gagap teknologi dan kurang menguasai teknik mengajar modern. Berbagai riset terbaru juga mengonfirmasi bahwa persoalan SDM ini berakar dari anggaran yang pas-pasan, minimnya pelatihan, beban kerja berat, sistem penggajian yang tidak transparan, hingga jaminan kesejahteraan yang masih jauh dari ideal.

---

[8] Adelia dan Mitra, 'Permasalahan Pendidikan Islam', h. 37; Riska Kalidya Alga dkk., 'Problematika Pendidikan Islam di Madrasah/Sekolah dan Alternatif Solusinya', *Journal of Islamic Education Management & Research (JIEMR)*, 1.1 (2023), h. 45-46.

[9] Alga, Riska Kalidya, 'Problematika Pendidikan Islam di Madrasah/Sekolah dan Alternatif Solusinya', *Journal of Islamic Education Management & Research (JIEMR)*, 1.1 (2023) h 41-42.

4. Sarana,Prasarana, dan Aset

Sarana dan prasarana adalah fondasi penting; tanpa fasilitas yang layak, sulit bagi lembaga pendidikan Islam untuk berkembang dan bermutu. Kenyataannya di lapangan, banyak sekolah yang masih menghadapi masalah gedung rusak, minimnya media belajar, buku perpustakaan seadanya, lab tidak standar, hingga teknologi yang tertinggal—sementara bantuan pemerintah belum cukup karena tata kelola dana yang masih lemah. Jika fasilitas ini direncanakan dan dirawat dengan baik, sekolah tentu akan punya daya tarik dan nilai tawar yang lebih tinggi di mata masyarakat. Masalah pelik lainnya menyangkut kejelasan aset, terutama tanah madrasah swasta dan pesantren tradisional yang mayoritas berasal dari wakaf. Banyak dari tanah tersebut belum bersertifikat resmi atau tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf yang lengkap. Akibatnya, aset lembaga menjadi sangat rentan terkena sengketa, diklaim oleh ahli waris, atau memicu konflik di antara generasi pengelola berikutnya.

5. Biaya

Masalah keuangan menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan Islam. Bantuan pemerintah untuk madrasah negeri ternyata lebih kecil daripada sekolah umum, sementara kondisi madrasah swasta jauh lebih memprihatinkan karena dananya sangat minim dan sebagian besar habis hanya untuk membayar gaji guru. Padahal, uang adalah bahan bakar utama agar sekolah bisa jalan dan berinovasi.[10] Kondisi serupa juga dialami pesantren yang sangat bergantung pada sumbangan tak terduga dari masyarakat, iuran wali santri, dan bantuan pemerintah yang tidak menentu. Akibat terlalu bergantung pada dana luar yang tidak stabil ini, rencana jangka panjang sekolah sering kali berantakan di tengah jalan.

6. Regulasi, Birokrasi, dan Akreditasi

Aspek regulasi dan birokrasi menghadirkan tantangan tersendiri bagi tata kelola pendidikan Islam. Pola birokrasi yang sentralistik cenderung mereduksi kemandirian lembaga dalam berinovasi. Di sisi lain, sistem akreditasi masih berorientasi pada aspek administratif (*input*) alih-alih peningkatan mutu hasil belajar. Problematika ini makin diperparah oleh kebijakan pemerintah yang kerap tidak diiringi dengan dukungan

[10] Arief, Hariyanto, Riyan Irhamsyah, dan Abrar Ridha, 'Peran Badan Wakaf dalam Penguatan Sistem Manajemen Pesantren', *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 4.1 (2026) h 2284.

infrastruktur, pendanaan, serta pelatihan yang merata, sehingga regulasi yang ada justru menjadi beban operasional khususnya bagi pesantren tradisional yang terbiasa mandiri.

7. Tata Kelola dan Transformasi Digital

Upaya mendigitalisasikan madrasah dan pesantren ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebagian besar lembaga masih harus berjuang membangun fondasi dasarnya, mulai dari fasilitas internet, aplikasi akademik, hingga kebiasaan bekerja berbasis data. Kendala utamanya bermuara pada tiga hal: keterbatasan perangkat, rendahnya literasi digital di kalangan guru dan kepala sekolah, serta kesenjangan fasilitas antara kota dan daerah. Tantangan ini makin diperparah oleh kebiasaan lama yang enggan berubah. Oleh karena itu, transformasi digital tidak bisa diselesaikan sekadar dengan membelikan perangkat canggih, melainkan butuh kesiapan mental manusianya serta dukungan kebijakan yang matang.

C. Upaya Penguatan Kelembagaan Pendidikan Islam

Berdasarkan problematika yang dialami oleh lembaga Pendidikan islam maka tentu ada kaitanya dengan Upaya- Upaya yang bertujuan untuk membenahi dan memberi penguatan berikut di antaranya:

1. Pembenahan Manajemen dan Kepemimpinan

Tata kelola yang baik bermula dari sistem kepemimpinan dan manajemen yang rapi. Selama ini, banyak lembaga pendidikan Islam melemah karena perencanaan yang asal-asalan dan gaya kepemimpinan yang terlalu tertutup atau otoriter. Makanya Solusi yang perlu dilakukan adalah Perlu ada perbaikan menyeluruh pada fungsi manajemen mulai dari analisis kebutuhan program, pembagian tugas yang jelas, hingga evaluasi berkala yang hasilnya benar-benar dipakai untuk perbaikan.tentunya Pemimpin memiliki peran penting yakni Kepala madrasah atau kiai yang Dimana tidak harus bekerja sendirian. melainkan mereka didorong untuk tampil sebagai pemimpin transformasional yang adaptif, mau merangkul guru-guru muda untuk menguasai teknologi, serta mengutamakan musyawarah tanpa harus kehilangan wibawa atau otoritas moral mereka.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas lulusan sangat bergantung pada kompetensi pengajarnya. Sayangnya, banyak guru di madrasah swasta dan pesantren yang masih menghadapi masalah klasik: gaji rendah, status honorer, beban kerja berat, hingga mengajar di luar bidang

keahliannya karena proses rekrutmen yang seadanya. Oleh karena itu Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara serius melalui standar rekrutmen berbasis kompetensi, pelatihan berkala (terutama literasi digital dan metode mengajar modern), serta penilaian kinerja yang transparan. Dan tidak pula mengkesampingkan Masalah kesejahteraan dan sistem insentif, ini juga harus diperhatikan, baik melalui dukungan anggaran pemerintah maupun kreativitas lembaga dalam memberdayakan potensi internal agar guru merasa dihargai dan bisa fokus mengajar.

3. Penguatan Pembiayaan dan Tata Kelola Aset

Masalah keuangan menjadi batu sandungan terbesar, terutama bagi madrasah swasta dan pesantren yang sangat bergantung pada sumbangan masyarakat atau iuran wali santri yang tidak menentu. Di sisi lain, banyak aset tanah wakaf yang belum bersertifikat resmi sehingga rawan sengketa hukum. Maka Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak lembaga adalah lembaga pendidikan mulai didorong untuk mengembangkan wakaf produktif seperti mengelola lahan perkebunan wakaf, mendirikan unit usaha ritel, koperasi santri, hingga memanfaatkan instrumen wakaf uang. Keuntungan dari usaha ini nantinya bisa dipakai untuk membiayai operasional sekolah, honor guru, dan subsidi santri kurang mampu. Selain itu, legalitas aset seperti sertifikasi tanah wakaf harus segera diurus agar posisinya aman dari konflik di masa depan.

4. Integrasi Kurikulum dan Digitalisasi Tata Kelola

Tuntutan perkembangan yang demikian pesatnya, para perancang kurikulum pendidikan Islam juga dituntut untuk memperluas cakupan yang terkandung dalam kurikulum pendidikan Islam, antara lain berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Dengan demikian kurikulum juga menjadi persoalan yang sangat urgent dalam dunia pendidikan.[11] Pendidikan Islam kerap dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai tradisi atau mengikuti perkembangan zaman. Di satu sisi, dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum masih sering dirasakan. Solusi yang dapat dilakukan adalah Kurikulum perlu diintegrasikan secara cerdas, seperti di pesantren yang tetap mempertahankan tradisi kajian kitab kuning namun memadukannya dengan kurikulum nasional, atau lewat konsep Sekolah

[11] Muslimah, "*Studi Lembaga Pendidikan Islam"* (CV Media Sains Indonesia, Bandung 2023) h 23

Islam Terpadu (SIT) yang menyatukan ilmu agama dan umum dalam satu atap. Dalam ranah transformasi digital pengelolaan administrasi sekolah juga sudah saatnya beralih ke sistem digital (seperti aplikasi akademik daring dan penyimpanan awan). Langkah ini tidak hanya membuat pekerjaan lebih efisien dan transparan, tetapi juga memudahkan audit dan mempercepat pelayanan bagi orang tua murid tanpa harus menghilangkan nilai-nilai keislaman.

5. Dukungan Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat

Kemajuan sebuah lembaga pendidikan tidak bisa dicapai sendirian; ia sangat membutuhkan sinergi yang kuat antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Lembaga yang sukses hampir selalu didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat dan komite sekolah, misalnya melalui forum komunikasi rutin dengan wali santri serta gotong royong dalam pembangunan fasilitas. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting diharapkan tidak hanya membuat aturan di atas kertas, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut realistis untuk diterapkan di lapangan. Kebijakan redistribusi anggaran, pelatihan merata, serta dukungan infrastruktur teknologi sangat dibutuhkan, terutama bagi lembaga-lembaga di daerah yang fasilitasnya masih tertinggal atau pelosok.[12]

KESIMPULAN

Kelembagaan pendidikan Islam adalah wadah organisasi penyelenggara pendidikan Islam beserta tata kelolanya. Ragamnya mencakup pesantren (salaf, khalaf, dan komprehensif), madrasah yang berkurikulum sekolah umum ditambah mata pelajaran agama, dan sekolah Islam terpadu yang memadukan pendidikan umum dan agama dalam satu kurikulum. Problematika kelembagaan pendidikan Islam meliputi tujuh kelompok yang saling berkaitan, yaitu lemahnya kepemimpinan dan manajemen, kurikulum dan dikotomi keilmuan, keterbatasan kompetensi dan kesejahteraan SDM, sarana prasarana dan status aset yang belum memadai, pembiayaan yang bergantung pada sumber eksternal, regulasi dan birokrasi yang sentralistik, serta kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. Akar yang menghubungkan ketujuhnya adalah tata kelola kelembagaan yang belum berjalan sebagai sistem.

[12] Sari, Dea Puspita, Juliani, Dio Septiawan, Fiqi Fahlevi, dan Khairul Hidayat, 'Kebijakan SDM Madrasah: Tantangan dan Peluang dalam Era Digitalisasi Pendidikan Islam', *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2.2 (2025) h 1327.

Upaya penguatan dapat ditempuh melalui pembenahan manajemen dan kepemimpinan, penguatan SDM melalui rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan insentif, penguatan pembiayaan dan tata kelola aset termasuk wakaf produktif, integrasi kurikulum dan digitalisasi tata kelola, serta dukungan kebijakan dan partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adelia dan Mitra, 'Permasalahan Pendidikan Islam', h. 37; Riska Kalidya Alga dkk., 'Problematika Pendidikan Islam di Madrasah/Sekolah dan Alternatif Solusinya', *Journal of Islamic Education Management & Research (JIEMR)*, 1.1 (2023), 32-46.

Alga, Riska Kalidya, Adinda Dwika, Rika Juwita Hasibuan, dan Marhamatul Khair, 'Problematika Pendidikan Islam di Madrasah/Sekolah dan Alternatif Solusinya', *Journal of Islamic Education Management & Research (JIEMR)*, 1.1 (2023), 39-49

Ali Nasith, Abdul Bashith, dan Asnawan, "Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Pendidikan Formal terhadap Santri pada Era Regulasi Pendidikan Nasional" *International Journal of Community Service Learning* 7, 2, (2023) 218-227.

Amir, Faradhillah, dan Ahmad Suja'i, 'Analisis Problematika dan Tantangan Madrasah Menjadi Lembaga Pendidikan Islam Unggul di Masa Neo Modern', *Tarbawi*, 6.2 (2023), 180-192.

Arief, Hariyanto, Riyan Irhamsyah, dan Abrar Ridha, 'Peran Badan Wakaf dalam Penguatan Sistem Manajemen Pesantren', *Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan*, 4.1 (2026), 2283-2293.

Istikomah, Rabiatul Adawiyah, dan Saiful Bahri, "Upaya Konstruktif terhadap Problematika Kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia" *Tadbir Muwahhid Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,* 8.01. (2024). 103-121.

Jaedi, Kurnaengsih, dan Sarwo Edi, "Problematika Kelembagaan Pendidikan Agama Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 4 (2023) 2647- 2659.

Mahyerni, "Analisis Kebijakan Dinamika Kelembagaan Pendidikan Islam: Pesantren, Madrasah, dan Sekolah Islam Terpadu di Indonesia: Studi Komparatif", *Tadribuna: Journal of Islamic Management Education*, 3.2 (2023) 38-50.

Medi Yulison Arza, "Problematika Pembelajaran PAI di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA" *Istinarah*, Riset *Keagamaan, Sosial dan Budaya,* 8 .1, (2026) 19-35.

Muslimah, "*Studi Lembaga Pendidikan Islam"* (CV Media Sains Indonesia, Bandung 2023)

Sari, Dea Puspita, Juliani, Dio Septiawan, Fiqi Fahlevi, dan Khairul Hidayat, 'Kebijakan SDM Madrasah: Tantangan dan Peluang dalam Era Digitalisasi Pendidikan Islam', *Mesada: Journal of Innovative Research*, 2.2 (2025), 1325-1333.